



Penguatan Moda Transportasi Lokal dalam Mendukung Kabupaten Pulau Morotai Sebagai Destinasi Wisata Unggulan

Ilham Junaid

Politeknik Pariwisata Makassar, Makassar, Indonesia

Artikel Masuk : 22 Juni 2018

Artikel Diterima : 14 Januari 2019

Tersedia Online : 30 April 2019

Abstrak: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia telah menetapkan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara sebagai sepuluh destinasi prioritas. Kebijakan ini berarti bahwa Morotai harus siap dengan berbagai elemen pendukung pariwisata termasuk moda transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi daya dukung moda transportasi di Morotai dan merekomendasikan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan pariwisata dalam perspektif moda transportasi lokal. Penelitian kualitatif melalui pendekatan naturalistik dan interpretatif dilakukan untuk meneliti moda transportasi di Pulau Morotai dengan melakukan wawancara kepada staf Dinas Pariwisata setempat dan penyedia layanan transportasi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moda transportasi yang ada dapat mendukung pengembangan pariwisata di Morotai. Namun, berbagai upaya atau langkah-langkah dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata melalui moda transportasi lokal. Pertama, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan penyedia layanan moda transportasi udara untuk jadwal penerbangan sangat dibutuhkan dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Kedua, dibutuhkan moda transportasi berbasis lokal yang kreatif sebagai wujud pelayanan pariwisata. Ketiga, penyediaan informasi yang akurat mengenai pelayanan moda transportasi laut menjadi kebutuhan dalam mendukung Morotai sebagai destinasi wisata unggulan.

Kata Kunci: destinasi wisata; moda transportasi; Pulau Morotai; transportasi lokal

Abstract: *The Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia has chosen Morotai Island Regency as one of ten prioritized tourism destinations. This policy requires tourism supporting elements including an adequate transportation system. This research aims to identify the supporting capacity of the local transportation modes from which the strategies of tourism development derived from. A qualitative methodology is applied by using naturalistic and interpretative approaches to investigate the capacity of transportation modes in Morotai Island. Interviews with the local tourism agency officials and the local transportation service providers are completed for collecting relevant data and information. The research reveals that the existing transportation modes can support tourism development in Morotai. However, there are some attempts required to support tourism based transportation system: strengthening the synergetic relations between the local government and the air transportation service providers for increasing flight schedule for tourists; providing creative local based transportation modes to support better tourism development; and providing*

Korespondensi Penulis: Politeknik Pariwisata Makassar, Makassar, Indonesia
email: illank77@yahoo.co.id

How to Cite:

Junaid, I. (2019). Penguatan moda transportasi lokal dalam mendukung Kabupaten Pulau Morotai sebagai destinasi wisata unggulan. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 7(1), 14-25. doi:10.14710/jwl.7.1.14-25.

© 2019 LAREDEM

accurate information about sea transportation service to support Morotai as the prioritized tourism destination.

Keywords: *local transportation; Morotai Island; tourism destination; transportation mode*

Pendahuluan

Sebelum melakukan perjalanan dan selama berada di wilayah geografis atau destinasi wisata, wisatawan akan memikirkan bagaimana aksesibilitas menuju destinasi dan daya tarik wisata. Transportasi atau alat transportasi menjadi kata kunci untuk memenuhi keinginan wisatawan dalam hal aksesibilitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa transportasi menjadi syarat utama bagi suatu wilayah yang akan dikembangkan sebagai destinasi wisata (Khadaroo & Seetanah, 2007; Page, 2004). Transportasi adalah alat yang menghubungkan antara satu destinasi dan destinasi lainnya ataupun antara daya tarik wisata dan daya tarik wisata lainnya. Dalam sistem pariwisata, transportasi menjadi unsur atau elemen utama selain aspek lainnya seperti akomodasi, daya tarik wisata, penyedia perjalanan (*travel organizers*) dan kelembagaan pariwisata (Divisekera, 2013; Mason, 2003; Theobald, 2005).

Salah satu alasan mengapa suatu destinasi atau wilayah dapat menjadi pilihan wisatawan adalah karena kemampuan wisatawan untuk mencapai destinasi tersebut dengan moda atau alat transportasi yang dapat digunakan. Moda transportasi yang baik menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi, ketika pariwisata menjadi pilihan suatu pemerintah daerah atau penentu kebijakan untuk dikembangkan. Namun, ketersediaan akomodasi, penyedia perjalanan dan daya tarik wisata lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan ketersediaan moda transportasi. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa transportasi perlu menjadi prioritas utama dalam membangun daerah sebagai destinasi wisata unggulan. Wibowo & Ma'rif (2014) berpandangan bahwa pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh bagaimana potensi pariwisata wilayah tersebut dikelola dan dikembangkan. Pariwisata menjadi alternatif untuk memajukan suatu wilayah jika ditunjang dengan moda transportasi yang baik.

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia mengenai pariwisata melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-652/Seskab/Maritim/11/2015 tanggal 6 November 2015, ditunjuk sebagai penentu kebijakan pengembangan pariwisata nasional untuk menjadikan Kabupaten Pulau Morotai sebagai salah satu prioritas di antara sepuluh destinasi yang diusulkan. Strategi ini diharapkan dapat mendorong Kabupaten Pulau Morotai untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan domestik. Melalui kebijakan ini, Kabupaten Pulau Morotai diharapkan membenahi pelayanan pariwisata baik yang berkaitan dengan akomodasi, informasi maupun transportasi. Wisatawan mengharapkan layanan pariwisata yang membuat mereka betah dan memperoleh kesan yang positif. Sharpley (2002) mengemukakan bahwa pengalaman positif wisatawan bergantung pada pelayanan yang diberikan oleh industri pariwisata, termasuk jasa transportasi. Oleh karena itu, moda transportasi yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai.

Idealnya, suatu destinasi yang diunggulkan memiliki moda transportasi yang dapat mendorong kemajuan pariwisata. Namun, moda transportasi tidak hanya dilihat dari bagaimana wisatawan dapat sampai ke destinasi wisata, akan tetapi perpaduan antara berbagai pengalaman wisatawan, baik ketika menuju destinasi dan kembali ke tempat asalnya, maupun transportasi selama melakukan aktivitas pariwisata. Penelitian ini mengkaji kondisi faktual moda transportasi yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Dalam konteks Indonesia, penelitian yang mengaitkan antara transportasi dan pariwisata masih sangat terbatas. Sementara, tuntutan akan pemberian layanan transportasi kepada

masyarakat dengan destinasi seperti Pulau Morotai menjadi suatu keharusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji daya dukung moda transportasi yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, dan mengusulkan strategi atau langkah-langkah untuk mengembangkan pariwisata daerah dalam perspektif moda transportasi berbasis lokal. Daya dukung diartikan sebagai kemampuan dan ketersediaan moda transportasi dalam menunjang pariwisata daerah. Berbagai moda transportasi menjadi salah satu bentuk daya dukung moda transportasi daerah.

Dalam memahami perjalanan wisatawan, terdapat lima dimensi perjalanan yakni tujuan perjalanan (*purpose of trip*), jarak perjalanan (*distance travelled*) dan durasi atau lama waktu suatu perjalanan (*duration of trip*), tempat tinggal wisatawan (*residence of traveller*) dan moda atau jenis transportasi (*mode of transportation*) (Gale, 2012; Hall & Page, 2006; Theobald, 2005). Dalam melakukan perjalanan, wisatawan memiliki motivasi atau tujuan yang berbeda. Secara garis besar, tiga tujuan utama wisatawan melakukan perjalanan antara lain untuk perjalanan bersenang-senang (*pleasure*), misalnya menikmati suasana alam dan melihat kebudayaan; untuk kegiatan yang bersifat profesional, misalnya melakukan pertemuan atau bisnis; serta tujuan lainnya, misalnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, jarak yang ditempuh oleh wisatawan ketika melakukan perjalanan juga menjadi penting dalam pelayanan pariwisata karena wisatawan ingin mengetahui berapa jarak dan lama perjalanan yang harus mereka tempuh (*duration of trip*). Pemahaman terkait asal wisatawan sangat berkaitan dengan bagaimana strategi memasarkan produk pariwisata yang dapat dijual ke calon wisatawan.

Moda transportasi sangat berkaitan dengan bagaimana calon wisatawan merencanakan perjalanan mereka, melalui pemanfaatan moda transportasi udara, laut, atau darat. Dapat dikatakan bahwa pariwisata dan transportasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu destinasi yang memungkinkan wisatawan mampu mencapai daya tarik wisata yang ada di destinasi tersebut (Cárdenas & Rosselló, 2015; Lew, 2008; Prideaux, 2000). Oleh karena itu, moda transportasi memungkinkan terjadinya proses datang dan pergi wisatawan ke dan dari suatu destinasi pariwisata, sedangkan moda transportasi memiliki keterkaitan dari aksesibilitas mencapai destinasi atau daya tarik wisata.

Moda transportasi dalam suatu wilayah umumnya dikelola oleh beberapa kelompok atau organisasi. Goodall (2006) membagi tiga jenis kelompok atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan transportasi di suatu destinasi. Pertama, kategori atau kelompok pemerintah (internasional, nasional dan lokal). Kelompok pertama ini mengembangkan atau mengatur kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan moda-moda transportasi. Kedua, penyedia infrastruktur yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang diterapkan pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur jalan. Dalam konteks Indonesia, infrastruktur jalan difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan lembaga lain dalam implementasinya. Ketiga, penyedia transportasi yang berperan dalam menyediakan alat transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau wisatawan. Kategori ketiga ini umumnya dikelola oleh pihak swasta karena mereka membuka usaha transportasi yang bersifat komersial.

Penelitian bidang pariwisata banyak difokuskan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan wisatawan, misalnya akomodasi dan hiburan (Jugović, Kovačić, & Saftić, 2010). Sementara, penelitian tentang transportasi dan kaitannya dengan pariwisata masih terbatas (Page, 2004). Salah satu alasan dari keterbatasan ini adalah karena transportasi cenderung dipandang sebagai pendukung pariwisata, bukan prioritas dalam pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini adalah pentingnya mengkaji bagaimana moda transportasi mampu mendukung pengembangan destinasi wisata.

Transportasi umum menjadi prasyarat utama bagi suatu destinasi untuk mengembangkan pariwisata (Lew, Hall, & Timothy, 2008; Williams, 2009). Dapat

dibayangkan apabila moda transportasi atau transportasi umum sebagai kebutuhan wisatawan tidak tersedia di suatu destinasi, padahal destinasi tersebut telah dibuka untuk tujuan pariwisata. Wisatawan mungkin saja menemui kendala apabila transportasi ini tidak terpenuhi bahkan memberikan kesan yang kurang baik mengenai suatu destinasi.

Dalam suatu destinasi, transportasi dibutuhkan oleh berbagai kalangan atau kelompok masyarakat. Dalam konteks pariwisata, kategorisasi kelompok masyarakat yang memanfaatkan transportasi di destinasi wisata dapat dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu masyarakat atau penduduk setempat, karyawan atau para pekerja di bidang industri pariwisata dan wisatawan itu sendiri (Hall, 2004). Penduduk di suatu destinasi memanfaatkan moda transportasi yang ada untuk kepentingan menjalankan aktivitas sehari-hari serta untuk mendukung pemenuhan perekonomian mereka. Masyarakat suatu destinasi akan memaksimalkan alat transportasi yang mereka miliki. Kelompok masyarakat ini tentunya akan menggunakan alat transportasi baik untuk keperluan tugas-tugas mereka maupun untuk kepentingan perjalanan lain, misalnya untuk tujuan perjalanan rekreatif. Kelompok masyarakat ini tidak terlibat dalam aktivitas pariwisata meskipun dalam kondisi tertentu mereka dapat saja menjadi wisatawan ketika memanfaatkan transportasi untuk tujuan menikmati atau mengunjungi daya tarik wisata.

Bagi mereka yang bekerja di industri pariwisata, misalnya karyawan hotel, restoran dan industri pariwisata lainnya juga menggunakan alat transportasi untuk kepentingan pekerjaan mereka. Keberadaan alat transportasi di destinasi wisata dapat dimanfaatkan masyarakat untuk tujuan melayani wisatawan. Bagi wisatawan, moda atau alat transportasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat suatu destinasi juga menjadi pilihan untuk mengakses daya tarik wisata dan mendapatkan pelayanan pariwisata. Untuk mendorong tercapainya tujuan pariwisata, maka dibutuhkan pengelolaan sumber daya pariwisata secara berkelanjutan oleh masyarakatnya (Elwizan & Damayanti, 2017). Moda transportasi yang dikelola oleh masyarakat dapat mendorong kemajuan wilayah yang akan berdampak pula pada keberlanjutan suatu wilayah sebagai destinasi wisata.

Hall (2004) mengemukakan tiga hal yang patut menjadi perhatian khususnya dalam mengembangkan destinasi wisata melalui moda transportasi. Pertama, transportasi bidang pariwisata mencakup berbagai hal yaitu moda atau bentuk transportasi, fungsi dari transportasi pariwisata tersebut dan pola kepemilikan transportasi. Kedua, bentuk transportasi yang sifatnya semata-mata diperuntukkan untuk tujuan pariwisata, misalnya pesawat carteran, mobil pribadi, bus ekspres dan lain-lain. Ketiga, alat transportasi yang fungsinya sebagai moda transportasi pariwisata yang melayani wisatawan.

Kunjungan wisatawan ke destinasi wisata mendorong destinasi wisata untuk semakin siap memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan transportasi. McKercher & Lew (2008) berpandangan bahwa kedatangan wisatawan ke destinasi telah memengaruhi pengembangan infrastruktur dan moda transportasi. Hal yang sama juga terjadi pada moda transportasi lokal yang ada di suatu destinasi. Transportasi lokal atau moda transportasi berbasis lokal dapat diartikan sebagai pemberian layanan transportasi kepada wisatawan ketika mereka berada di destinasi dengan memanfaatkan kapasitas moda transportasi lokal yang ada. Wisatawan akan memanfaatkan jenis transportasi yang ada di destinasi untuk memudahkan perjalanan mereka mengunjungi daya tarik wisata. Oleh karena itu, moda transportasi berbasis lokal perlu mendapat perhatian bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) pariwisata di suatu destinasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk meneliti kondisi faktual moda transportasi yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Snape & Liz (2003) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai pengamat

(*observer*) terhadap fenomena sosial yang ada dengan menekankan pendekatan alamiah (*naturalistic*) dan interpretatif (*interpretive*). Hal ini diartikan bahwa peran peneliti sangat penting dalam memahami makna (*meaning*) dari kondisi faktual yang terjadi di destinasi wisata. Pendekatan kualitatif mampu menghasilkan pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial didasarkan pada pengalaman dan informasi dari informan serta hasil pengamatan peneliti (Ritchie, 2003; Snape & Liz, 2003).

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai serta wawancara informal kepada masyarakat atau sopir kendaraan baik mobil, bentor maupun ojek dengan jumlah informan yang terlibat sebanyak 10 (sepuluh) orang. Penentuan narasumber yang terlibat dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode penentuan sampel ini dilakukan untuk memilih narasumber berdasarkan latar belakang dan kedudukan dari narasumber tersebut. Ketersediaan narasumber dalam memberikan informasi juga menjadi alasan penentuan metode *purposive sampling*. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di destinasi wisata karena mereka memahami kondisi aktual daerah, khususnya yang berkaitan dengan moda transportasi di Morotai.

Informasi yang disampaikan oleh informan didengar secara seksama dan dicatat dalam bentuk catatan penelitian selama melakukan penelitian. Pencatatan ini juga dimanfaatkan untuk mencatat informasi yang diperoleh melalui observasi partisipatif (*participant observation*). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti juga bertindak sebagai wisatawan. Tiga orang staf Dinas Pariwisata serta empat orang pemberi layanan transportasi berpartisipasi dalam wawancara penelitian. Selanjutnya, data kualitatif yang diperoleh dianalisis dengan menerapkan prinsip deskriptif dan interpretatif (Ritchie, Spencer, & O'Connor, 2003). Tema-tema (*themes*) atau konsep (*concepts*) dari data kualitatif menjadi fokus penulis dalam memahami dan menganalisis informasi kualitatif yang diperoleh (Auerbach & Silverstein, 2003; Baez, 2002; Butler-Kisber, 2010; Liamputtong, 2009; Ritchie et al., 2003). Dari hasil analisis tematik tersebut, dihasilkan rumusan langkah strategis sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pariwisata Morotai dan Daya Dukung Transportasi

Pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pulau Morotai dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pulau Morotai. Sebagai organisasi pemerintah yang diberikan amanah mengelola aset daerah, Disparbud setempat memiliki visi “Morotai sebagai destinasi wisata dunia berbasis bahari, budaya dan sejarah”. Visi ini didasarkan pada aset pariwisata yang dimiliki daerah yang tidak hanya mengandalkan wilayah geografis berupa pulau-pulau untuk wisata bahari, tetapi juga budaya dan aspek kesejarahan berupa peninggalan artefak masa kolonial. Dari potensi pariwisata ini, pemerintah daerah melalui peran Disparbud melaksanakan aktivitas atau program kerja yang bertujuan untuk mendukung kemajuan pariwisata daerah dalam konteks wisata bahari, budaya dan sejarah.

Pulau Zum Zum McArthur (*Zum Zum McArthur Island*) menjadi salah satu andalan daerah Morotai yang dipromosikan ke wisatawan. Pulau Zum Zum McArthur merupakan pulau wisata yang di dalamnya terdapat penginapan atau rumah yang diperuntukkan khusus sebagai penginapan, beberapa gazebo untuk digunakan sebagai tempat istirahat pengunjung, patung McArthur (seorang komandan tentara kolonial), serta papan nama Pulau Zum Zum McArthur yang berdiri di atas pasir putih. Meskipun pulau ini menjadi daya tarik wisata unggulan daerah dan telah dimasukkan ke dalam brosur pemerintah daerah sebagai aset wisata, namun eksistensi pulau ini terkesan ditinggalkan dan tidak

dikelola dengan baik. Pulau ini dapat menjadi daya tarik wisata bahari dan sejarah meskipun kenyataannya, tidak terurus dan tanpa pengelola.

Kunjungan ke Pulau/Desa Koloray dan Pulau Dodola memberikan data mengenai pariwisata Morotai. Dibandingkan Pulau McArthur, Pulau/Desa Koloray sangat potensial menarik wisatawan asing dan domestik menikmati aktivitas bahari dan suasana alam yang unik dengan kebudayaan masyarakat pantai. Pulau ini telah dilengkapi pusat informasi pariwisata dan rumah penduduk yang dijadikan sebagai *homestay* sehingga pulau ini telah menjadi desa wisata binaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pulau Dodola menjadi daya tarik wisata utama Pulau Morotai bagi wisatawan. Pulau ini telah diprioritaskan dan dikelola oleh pemerintah daerah sebagai aset wisata utama pemerintah daerah. Di Pulau Dodola, pengunjung dapat menikmati suasana pulau dan pantai dan memungkinkan wisatawan untuk tinggal dan menghabiskan waktu di pulau ini. Karena itu, fasilitas penginapan (akomodasi), rumah makan, perahu motor (*speed boat*) untuk aktivitas bahari serta tempat rekreasi disediakan untuk mendukung pelayanan ke wisatawan.

Pariwisata Morotai juga dibangun dengan ketersediaan daya tarik wisata sejarah. Situs makam sekutu Perang Dunia II menjadi saksi bahwa Morotai merupakan wilayah yang memiliki nilai sejarah dan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang senang akan sejarah. Keberadaan museum Perang Dunia II juga menjadi pilihan untuk dikunjungi bagi wisatawan sejarah. Selanjutnya, sejarah Perang Dunia II juga dapat disaksikan dengan peninggalan berupa bangkai tank amfibi LVT-2. Berbagai peninggalan sejarah yang ada di Morotai adalah bukti bahwa Morotai layak menjadi pilihan kunjungan bagi mereka yang ingin mengetahui dan menjelajahi sejarah perang masa lampau. Hal tersebut yang mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan wisata sejarah dan budaya sebagai salah satu misi pemerintah Morotai.

Saat ini transportasi belum menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk mengakses daya tarik wisata alam, budaya dan sejarah di Kabupaten Pulau Morotai. Untuk menuju Morotai, konektivitas perjalanan udara telah tersedia dari beberapa wilayah di Indonesia, misalnya dari Manado ke Morotai. Berdasarkan hasil observasi, hanya ada satu penerbangan menuju dan keluar dari Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya, untuk mencapai destinasi atau lokasi tempat penginapan, wisatawan dapat menggunakan kendaraan pribadi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membawa wisatawan ke tempat penginapan. Jumlah kendaraan ini masih sangat terbatas dan wisatawan harus bertanya ke petugas bandara mengenai akses transportasi yang dapat digunakan untuk menuju tempat menginap.

Dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia, Kabupaten Pulau Morotai masih jauh berbeda dalam penyediaan moda transportasi darat. Kendaraan (mobil) pribadi sudah dimiliki oleh masyarakat setempat, tetapi dalam jumlah yang masih terbatas. Kendaraan angkutan umum berupa mobil belum tersedia sehingga mobil pribadi dimanfaatkan untuk mengangkut penumpang dari bandara. Wisatawan dapat meminta masyarakat mencarikan kendaraan jika ingin menggunakan kendaraan (mobil) untuk keperluan eksplorasi daerah. Di sekitar daerah Kota Morotai terdapat penyewaan (*rental*) mobil meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas. Hasil observasi melalui kunjungan ke salah satu kantor penyewaan mobil dengan maksud untuk menyewa kendaraan mengelilingi wilayah Pulau Morotai menunjukkan bahwa penyedia layanan tidak dapat membantu mengingat pengelola atau pemilik usaha tersebut tidak ada di tempat dan kendaraan yang dimaksud juga tidak tersedia.

Dilihat dari moda transportasi yang ada di Morotai, dapat dikatakan bahwa daya dukung transportasi daerah sudah cukup untuk melayani wisatawan asing dan domestik. Moda transportasi ini tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah Morotai dengan akses daya tarik wisata ke daya tarik wisata lainnya dapat ditempuh dengan tiga jenis moda transportasi. Namun, dilihat dari eksklusivitas dan pemenuhan harapan wisatawan, moda transportasi yang ada harus benar-benar dapat dipenuhi dengan ketersediaan kendaraan

(mobil) pribadi yang dapat dinikmati oleh wisatawan asing. Wisatawan asing mungkin tidak dapat memanfaatkan kendaraan becak motor dan ojek dalam eksplorasi kota. Namun, becak motor dan ojek adalah transportasi lokal yang tersedia di daerah tersebut. Oleh karena itu, becak motor dan ojek dapat menjadi pilihan wisatawan asing dengan beberapa kondisi yang selayaknya terpenuhi (Gambar 1).



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017

Gambar 1. (a) Moda Transportasi Darat dan (b) Moda Transportasi Laut di Pulau Morotai

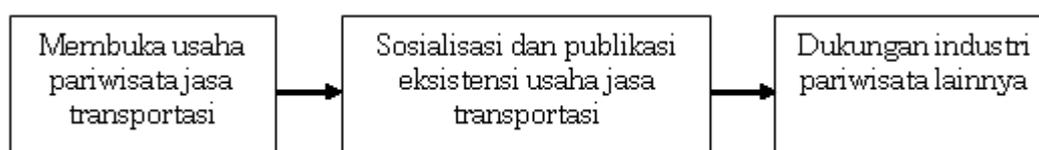
Transportasi Berbasis Lokal dan Strategi Menuju Destinasi Unggulan

Pengembangan pariwisata suatu destinasi tidak semata-mata dilihat dari ketersediaan atau daya dukung unsur yang berdiri sendiri, misalnya akomodasi, hiburan ataupun daya tarik wisata. Suatu destinasi membutuhkan perpaduan pelayanan antara berbagai elemen pariwisata, tidak semata-mata ketersediaan daya tarik wisata, tetapi pelayanan yang multidimensi (Buckley, 2010; Hankinson, 2005). Akomodasi, transportasi dan hiburan menjadi satu kesatuan dalam memberikan pelayanan yang maksimal ke wisatawan (Debbage & Loannides, 2012; Weiermair, 2000). Sesungguhnya, kebutuhan wisatawan akan akomodasi selama berada di Kabupaten Morotai telah dapat dipenuhi dengan ketersediaan beberapa hotel, rumah makan dan transportasi. Dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia, maka kebutuhan wisatawan akan pelayanan yang eksklusif baik berupa hotel mewah, transportasi maupun hiburan mungkin belum dapat dipenuhi. Salah satu alasannya adalah karena daerah ini masih baru sebagai destinasi wisata.

Moda transportasi adalah salah satu bagian penting dalam mendukung program pemerintah pusat menjadikan Morotai sebagai destinasi unggulan. Idealisme memenuhi kebutuhan wisatawan akan transportasi yang eksklusif di Morotai mungkin belum dapat terealisasi mengingat kondisi kekinian yang masih memanfaatkan kendaraan berbasis lokal sebagai penopang aksesibilitas ke daya tarik wisata yang satu ke daya tarik wisata lainnya. Akan tetapi, transportasi berbasis lokal dapat menjadi kekuatan Kabupaten Morotai jika langkah-langkah strategis dapat dijalankan dalam mendukung pariwisata. Penelitian ini memandang bahwa terdapat beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong moda transportasi berbasis lokal sebagai pendukung pariwisata.

Penguatan moda transportasi berbasis kendaraan atau mobil dapat menjadi pilihan utama dalam memberikan pelayanan ke wisatawan. Wisatawan dapat mengalami kesulitan dalam mencari informasi mengenai pelayanan kendaraan (mobil) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan eksplorasi daya tarik wisata, ketika berada di Morotai. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa terdapat strategi yang dapat ditempuh dalam mengoptimalkan kendaraan mobil sebagai moda pelayanan wisatawan sebagai berikut: (1) dibutuhkan usaha

pariwisata bidang perjalanan yang khusus memberikan pelayanan kendaraan bagi wisatawan. Usaha penyewaan kendaraan dapat menjadi alternatif bagi wisatawan dalam memberikan jasa transportasi bagi wisatawan; (2) dibutuhkan sosialisasi atau publikasi informasi mengenai eksistensi usaha jasa layanan transportasi, ketika usaha jasa pemberian layanan transportasi dijalankan oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya wisatawan yang masuk ke Morotai melalui bandara harus mencari tahu moda transportasi yang dapat digunakan untuk sampai ke tempat tujuan. Hal ini berarti bahwa informasi mengenai jasa layanan transportasi masih sangat sedikit, bahkan informasi yang jelas mengenai moda transportasi tersebut tidak tersedia; dan (3) industri atau usaha pariwisata di Morotai perlu mendukung ketersediaan informasi layanan transportasi bagi wisatawan. Di hotel tidak terdapat informasi mengenai kendaraan mobil yang dapat disewa atau digunakan untuk kemudahan wisatawan. Konektivitas informasi sangat dibutuhkan di Kabupaten Pulau Morotai dalam mendukung layanan jasa transportasi ke wisatawan. Oleh karena itu, usaha pariwisata lainnya perlu dilengkapi dengan informasi yang akurat mengenai bagaimana wisatawan dapat menghubungi penyedia jasa transportasi kendaraan mobil. Gambaran ketiga langkah strategis ini dapat dilihat pada Gambar 2.



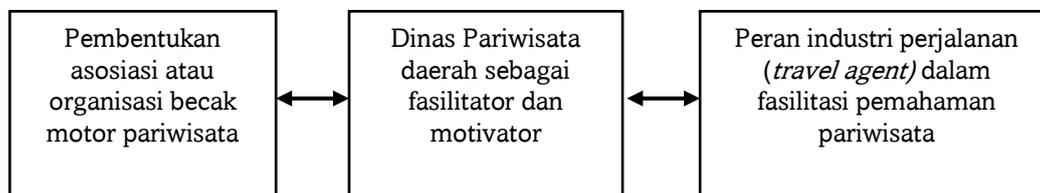
Sumber: Analisis Penulis, 2017

Gambar 2. Strategi Penyediaan Layanan Transportasi Wisatawan

Arah panah pada Gambar 2 menunjukkan hubungan garis lurus melalui suatu proses langkah strategis. Usaha pariwisata jasa transportasi yang dikelola oleh masyarakat perlu disebarkan atau disosialisasikan kepada wisatawan agar mereka mengetahui keberadaan usaha tersebut. Selain itu, perlu dukungan industri pariwisata untuk mempromosikan dan membantu pemanfaatan usaha transportasi oleh wisatawan. Prideaux (2000) menyatakan bahwa usaha transportasi perlu didukung oleh keberadaan industri lain untuk menunjang pengembangan destinasi wisata.

Moda transportasi berbasis lokal berupa becak motor (bentor) dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan pariwisata dalam perspektif transportasi lokal sebagai pendukung pariwisata. Wisatawan dapat memanfaatkan jasa layanan becak motor tersebut untuk melakukan eksplorasi atau kunjungan ke beberapa daya tarik wisata unggulan daerah tersebut. Dalam perspektif wisatawan internasional, becak motor mungkin tidak menjadi pilihan wisatawan. Namun, nuansa lokal dan aspek kewilayahan atau kondisi geografis daerah Morotai menjadikan becak motor sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pariwisata. Oleh karena itu, dibutuhkan asosiasi atau organisasi yang bertugas untuk menjembatani para sopir atau tukang becak motor untuk memberikan pelayanan transportasi ke wisatawan. Idealnya, masyarakat yang berprofesi sebagai tukang becak motor dapat memberikan layanan kepada wisatawan. Namun, interaksi antara wisatawan asing dan domestik serta masyarakat atau tukang becak motor perlu dijembatani dengan peran asosiasi atau organisasi pelaku kendaraan becak motor. Peran utama dari asosiasi ini adalah memberikan pemahaman kepada tukang becak motor bagaimana memberikan pelayanan ke wisatawan khususnya ketika wisatawan ingin mengunjungi daya tarik wisata. Pemerintah daerah juga perlu segera memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku becak motor akan pentingnya pariwisata bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat. Dinas Pariwisata daerah perlu segera memberikan keterampilan dan pengetahuan pariwisata kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan sistem

transportasi sebagai pendukung utama pariwisata daerah. Selain itu, industri perjalanan atau *travel agent* yang terlibat dalam mendatangkan wisatawan ke Kabupaten Morotai dapat membantu para tukang becak motor untuk memahami pola perjalanan wisatawan ketika berada di Morotai. Pola perjalanan ini akan sangat bermanfaat bagi wisatawan dalam memahami potensi kepariwisataan yang dimiliki daerah serta menikmati aktivitas pariwisata di destinasi wisata. Gambaran ketiga langkah ini dapat dilihat pada Gambar 3;



Sumber: Analisis Penulis, 2017

Gambar 3. Optimalisasi Becak Motor Sebagai Moda Transportasi Lokal Bagi Wisatawan

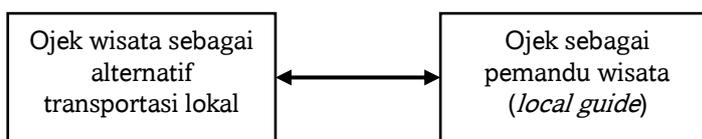
Gambar 3 menunjukkan hubungan yang tidak terpisahkan antara masyarakat sebagai penyedia moda transportasi dan peran pemerintah dan industri perjalanan wisata. Hal ini sejalan dengan pendapat Wang (2011), bahwa sektor transportasi (khususnya transportasi lokal) tidak dapat dipisahkan dari peran organisasi pariwisata yang memungkinkan terjadinya aktifitas pariwisata. Asosiasi becak motor adalah bentuk peran masyarakat dalam menjalankan peran pelayanan bidang transportasi kepada wisatawan dengan dukungan pemerintah dan industri pariwisata.

Transportasi lokal yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat adalah motor atau ojek. Dalam perspektif wisatawan, ojek mungkin bukan menjadi pilihan. Namun, seiring dengan harapan wisatawan untuk mengakses dan menikmati daya tarik wisata alam dan budaya yang dimiliki daerah, maka ojek atau kendaraan bermotor dapat menjadi pilihan bagi wisatawan. Ojek merupakan transportasi yang berbasis lokal sehingga pemerintah setempat perlu memilih beberapa kelompok sopir atau tukang ojek untuk menjadi ojek wisata. Ojek wisata ini akan berperan sebagai penyedia layanan transportasi yang juga berperan sebagai pemberi informasi pariwisata. Pendidikan dan pelatihan singkat kepada sopir ojek merupakan langkah awal untuk memaksimalkan peran ojek. Hal yang terpenting adalah sopir ojek diberi tanda pengenalan baik berupa pakaian, kendaraan atau kartu tanda pengenalan. Sopir ojek wisata ini juga dapat berfungsi sebagai pemandu (*guide*) lokal yang sudah mendapatkan pelatihan. Sebagai pemandu dan pemberi layanan transportasi, isu keamanan dan keselamatan (*safety*) wisatawan harus menjadi prioritas. Pemanfaatan ojek ini umumnya dapat dimanfaatkan oleh wisatawan domestik yang memahami bahasa lokal, namun dapat juga dimanfaatkan oleh wisatawan asing dengan fasilitasi bahasa asing oleh sopir ojek. Gambaran kedua langkah ini ini diuraikan pada Gambar 4.

Gambar 4 menunjukkan pentingnya ojek wisata sebagai alternatif penyediaan moda transportasi bagi wisatawan. Kondisi di Morotai dengan keterbatasan moda transportasi mengharuskan masyarakat sebagai pemandu wisata. Bagi wisatawan yang memanfaatkan ojek wisata dapat memanfaatkan sopir ojek sebagai pemandu wisata. Hal ini sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pariwisata (Scheyvens, 2002).

Potensi Kabupaten Pulau Morotai berupa pulau-pulau hanya dapat diakses dengan moda transportasi laut. Hasil observasi menunjukkan bahwa jasa transportasi perahu motor (*motor/speed boat*) dapat dimanfaatkan untuk mengunjungi Pulau Zum Zum McArthur, Pulau Dodola dan Pulau Koloray. Untuk menggunakan *speed boat* wisatawan dapat

mengunjungi pelabuhan kemudian membuat kesepakatan atau janji dengan pemilik atau sopir perahu motor untuk rencana perjalanan untuk esok harinya.



Sumber: Analisis Penulis, 2017

Gambar 4. Optimalisasi Ojek Motor Sebagai Alternatif Pelayanan Jasa Transportasi Pariwisata

Hasil observasi menunjukkan bahwa pemilik atau sopir tersebut membatalkan rencana pengantaran tersebut karena berbagai alasan. Sebagai wisatawan, hal ini menjadi catatan bahwa moda pelayanan transportasi perlu dikelola secara profesional. Oleh karena itu, berdasarkan observasi langsung dan wawancara dengan pemangku kepentingan di Morotai, terdapat beberapa langkah strategis untuk mengoptimalkan moda transportasi laut sebagai berikut:

1. Pemberian layanan moda transportasi laut perlu menerapkan prinsip kejelasan dan ketepatan jadwal, harga dan pengelola. Hasil observasi menunjukkan bahwa wisatawan menemui kesulitan mendapatkan informasi mengenai moda pemesanan alat transportasi *speed boat* untuk menuju pulau-pulau di Pulau Morotai, ketika berada di pelabuhan, Harga yang ditawarkan oleh pemilik *speed boat* juga bervariasi tergantung negosiasi antara pengguna dan pemilik perahu. Sementara itu, tidak ada informasi mengenai jadwal dan daya tarik wisata (pulau) yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Informasi pelayanan transportasi laut sangat penting agar wisatawan mendapatkan kejelasan informasi yang dibutuhkan;
2. Moda keamanan perjalanan laut (*safety*) seharusnya menjadi prioritas ketika pengantar memberikan pelayanan transportasi ke wisatawan. Selain itu, tidak ada alat pelampung sebagai salah satu unsur utama keselamatan transportasi laut ketika melakukan perjalanan dengan *speed boat*. Bagi penyedia layanan transportasi, perjalanan wisatawan akan aman. Namun, keselamatan selalu menjadi aspek utama bagi wisatawan.

Sistem transportasi di Kabupaten Pulau Morotai membutuhkan sinergi yang saling terkait antara berbagai pemangku kepentingan. Kedatangan wisatawan ke Morotai juga harus mengandalkan moda transportasi udara untuk membawa wisatawan ke destinasi tersebut. Sinergi antara pemerintah daerah dengan penyedia layanan transportasi udara juga harus terbangun untuk memungkinkan penambahan rute perjalanan wisatawan ke Morotai. Selanjutnya, sinergi yang terbangun tersebut akan menjadikan moda transportasi berbasis lokal di Morotai dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendukung pengembangan pariwisata.

Kesimpulan

Sebagai salah satu destinasi wisata prioritas yang diusulkan oleh pemerintah, Kabupaten Pulau Morotai telah berbenah untuk memenuhi berbagai aspek pendukung pariwisata. Transportasi menjadi unsur yang juga tidak luput dari perhatian pemangku kepentingan pariwisata. Meskipun realitas menunjukkan bahwa Morotai membutuhkan upaya yang maksimal untuk mengelola moda transportasi, pemenuhan kebutuhan wisatawan akan transportasi sesungguhnya dapat terpenuhi. Untuk mengakses Morotai dari seluruh wilayah di Indonesia, moda transportasi udara masih terbatas pada satu

penerbangan komersial yang melayani rute menuju Morotai. Selanjutnya, moda transportasi darat masih mengandalkan kendaraan (mobil) pribadi yang dimanfaatkan untuk tujuan transportasi komersial. Alat transportasi berbasis lokal dapat menjadi kekuatan pendukung pariwisata Pulau Morotai apabila ada komitmen dari para pemangku kepentingan pariwisata untuk mendukung upaya optimalisasi moda transportasi berbasis lokal. Penguatan moda transportasi berbasis lokal dapat membantu program pemerintah (pusat dan daerah) menjadikan Morotai sebagai destinasi unggulan berbasis bahari, budaya dan sejarah.

Penelitian ini telah merekomendasikan beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan untuk menguatkan moda transportasi di Kabupaten Pulau Morotai. Tiga jenis moda transportasi (udara, darat dan laut) dapat diperkuat dengan melakukan analisis kebutuhan wisatawan yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pengelolaan alat transportasi berbasis pariwisata. Saat ini, moda transportasi udara komersial telah berjalan dengan baik. Namun, pemerintah daerah perlu melakukan sinergi dengan otoritas penyedia transportasi kemungkinan membuka alternatif jumlah penerbangan dengan komitmen daerah mempromosikan Morotai agar meningkatkan jumlah wisatawan. Transportasi berbasis lokal terlihat dari bagaimana mendorong atau membuat kendaraan lokal (darat) menjadi moda transportasi pilihan wisatawan. Ketika wisatawan ingin mengakses pulau-pulau wisata di Pulau Morotai, maka moda pelayanan informasi transportasi harus menjadi prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moda transportasi yang ada di Morotai telah memenuhi keterbatasan informasi dan kajian yang berkaitan dengan pariwisata dan moda transportasi. Hal ini berarti bahwa pengetahuan tentang moda transportasi tidak hanya dilihat dari konteks infrastruktur semata, tetapi memiliki keterkaitan dengan pariwisata sebagaimana yang ditunjukkan di Morotai.

Penelitian ini semakin menguatkan pentingnya eksistensi moda transportasi lokal sebagai syarat terwujudnya destinasi wisata unggulan. Hal ini sejalan dengan pandangan McKercher & Lew (2008) dan Williams (2009) tentang konektifitas pariwisata dan sistem transportasi. Dengan kata lain, daya dukung transportasi yang ada di suatu daerah akan berpengaruh terhadap kenyamanan wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Sebaliknya, kedatangan wisatawan ke destinasi dapat menjadi pendorong bagi pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan untuk semakin memperkuat moda transportasi lokal dengan kebijakan yang mendorong terwujudnya pelayanan wisata dari sektor transportasi.

Daftar Pustaka

- Auerbach, C., & Silverstein, L. B. (2003). *Qualitative data: An introduction to coding and analysis (qualitative studies in psychology)*. New York: New York University Press.
- Baez, B. (2002). Confidentiality in qualitative research: Reflections on secrets, power and agency. *Qualitative Research*, 2(1), 35–58. doi:10.1177/1468794102002001638.
- Buckley, R. (2010). *Adventure tourism management*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Butler-Kisber, L. (2010). *Qualitative inquiry: Thematic, narrative and arts-based perspectives* (First Edit). Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd.
- Cárdenas, V., & Rosselló, J. (2015). Tourism and climate change: Challenges for tourism destinations. In K. H. Collins (Ed.), *Handbook on Tourism Development and Management* (pp. 21–38). New York: Nova.
- Debbage, K. G., & Loannides, D. (2012). The economy of tourism spaces: A multiplicity of “critical turns.” In J. Wilson (Ed.), *The routledge handbook of tourism geographies* (pp. 149–156). London: Routledge.
- Divisekera, S. (2013). Tourism demand models: Concepts and theories. In *Handbook of tourism economics* (pp. 33–66). Singapore: World Scientific. doi:10.1142/9789814327084_0002.
- Elwizan, F. S., & Damayanti, M. (2017). Pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan rawan bencana untuk kegiatan pariwisata. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 5(2), 71–82. doi:10.14710/jwl.5.2.71-82.
- Gale, T. (2012). Tourism geographies and post-structuralism. In *The Routledge Handbook of Tourism*

- Geographies* (pp. 37–45). Oxford: Routledge.
- Goodall, B. (2006). Disabled access and heritage attractions. *Tourism Culture and Communication*, 7(1), 57–78. doi:10.3727/109830406778493551.
- Hall, C. M., & Page, S. J. (2006). *The geography of tourism and recreation: Environment, place and space*. London: Routledge.
- Hall, D. (2004). Transport and tourism: Some policy issues. *Scottish Geographical Magazine*, 120(4), 311–325.
- Hankinson, G. (2005). Destination brand images: A business tourism perspective. *Journal of Services Marketing*, 19(1), 24–32. doi:10.1108/08876040510579361.
- Jugović, A., Kovačić, M., & Saftić, D. (2010). Choice of destination, accommodation and transportation in times of economic crisis. *Tourism and Hospitality Management*, 16(2), 165–180. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/256020018_Choice_of_Destination_Accommodation_and_Transportation_in_Times_of_Economic_Crisis.
- Khadaroo, J., & Seetanah, B. (2007). Transport infrastructure and tourism development. *Annals of Tourism Research*, 34(4), 1021–1032. doi:10.1016/j.annals.2007.05.010.
- Lew, A. A. (2008). Long tail tourism: New geographies for marketing Niche tourism products. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 25(3–4), 409–419. doi:10.1080/10548400802508515.
- Lew, A., Hall, C. M., & Timothy, D. J. (2008). *World geography of travel and tourism: A regional approach*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Liamputtong, P. (2009). Qualitative data analysis: Conceptual and practical considerations. *Health Promotion Journal of Australia*, 20(2), 133–139. doi:10.1071/he09133.
- Mason, P. (2003). *Tourism impacts, planning and management*. Burlington: Butterworth-Heinemann.
- McKercher, B., & Lew, A. A. (2008). Tourist flows and the spatial distribution of tourists. In *A companion to tourism* (pp. 36–48). Malden: Blackwell Publishing Ltd.
- Page, S. J. (2004). Transport and tourism. In Alan A. Lew, C. M. Hall, & A. M. Williams (Eds.), *A companion to tourism* (pp. 146–158). Malden: Blackwell Publishing Ltd.
- Prideaux, B. (2000). The role of the transport system in destination development. *Tourism Management*, 21(1), 53–63. doi:10.1016/S0261-5177(99)00079-5.
- Ritchie, J, Spencer, L., & O' Connor, W. (2003). Carrying out qualitative analysis. In R. Jane & L. Jane (Eds.), *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers* (pp. 219–262). London: SAGE Publications Ltd.
- Ritchie, Jane. (2003). The applications of qualitative methods to social research. In R. Jane & L. Jane (Eds.), *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers* (pp. 24–48). London: SAGE Publications Ltd.
- Scheyvens, R. (2002). *Tourism for development: Empowering communities*. Harlow: Prentice Hall.
- Sharpley, R. (2002). Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus. *Tourism Management*, 23(3), 233–244. doi:10.1016/S0261-5177(01)00078-4.
- Snape, D., & Liz, S. (2003). The foundations of qualitative research. In R. Jane & L. Jane (Eds.), *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers* (pp. 1–23). London: SAGE Publications Ltd.
- Theobald, W. F. (2005). The meaning, scope and measurement of travel and tourism. In W. F. Theobald (Ed.), *Global tourism* (Third Edit, pp. 5–24). Amsterdam: Elsevier Inc.
- Wang, Y. C. (2011). Destination marketing and management: Scope, definition and structures. In Y. Wang & A. Pizam (Eds.), *Destination marketing and management: Theories and applications* (pp. 1–20). Wallingford: CABI. doi:10.1079/9781845937621.0001.
- Weiermair, K. (2000). Tourists' perceptions towards and satisfaction with service quality in the cross-cultural service encounter: implications for hospitality and tourism management. *Managing Service Quality: An International Journal*, 10(6), 379–409. doi:10.1108/09604520010351220.
- Wibowo, P. A. S., & Ma'rif, S. (2014). Alternatif strategi pengembangan Desa Rahtawu sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Kudus. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 2(3), 245–256. doi:10.14710/jwl.2.3.245-256.
- Williams, S. (2009). *Tourism geography: A new synthesis*. London: Routledge.